BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BINUS UNIVERSITY

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA INDONESIA

DISUSUN OLEH TIM PROYEK INISIATIF

Dr. Lili Yulyadi Arnakim, B.IRK., B.HSc., M.HSc.
Dr. Miranda Tahalele, S.IP., MA.
Dr. Roseno Aji Affandi, S.E., M.M.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA INDONESIA (STUDI KASUS DESA WONOKITRI - PASURUAN DAN DESA BATU CERMIN - LABUAN BAJO)

Disusun sebagai luaran dari proyek inisiatif 2024 ES00863

Hubungan Internasional
Universitas Bina Nusantara
2024

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA INDONESIA (STUDI KASUS DESA WONOKITRI - PASURUAN DAN DESA BATU CERMIN - LABUAN BAJO)

Disusun oleh:
Dr. Lili Yulyadi Arnakim, B.IRK., B.HSc., M.HSc.
Dr. Miranda Tahalele, S.IP., MA.
Dr. Roseno Aji Affandi, S.E., M.M.

Hubungan Internasional
Universitas Bina Nusantara
2024

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....1

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.....3

Kondisi Kekinian.....4

Kondisi Pariwisata Nasional.....4

Pariwisata Daerah.....4

Temuan dari observasi.....6

Rekomendasi Kebijakan untuk Desa Wisata.....11

Rekomendasi Umum dan Usulan pengembangan.....13

Referensi.....14

Biografi Penulis.....15

PENDAHULUAN

Sektor Wisata menjadi salah satu faktor penting yang semakin dikembangkan oleh pemerintah untuk menunjang dan mendorong proses pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (Grillie et.al, 2021; Guo, Jiang & Li, 2019). Pariwisata juga diindikasikan mampu mendorong integrasi sosial dengan membangun hubungan antara budaya, tempat, kebiasaan, dan waktu (Streimikiene, et.al., 2021). UN World Tourism Organisation (UNWTO) mengidentifikasikan pengembangan pariwisata global dengan prioritas pada mendorong pariwisata yang berkelanjutan, mengembangkan keilmuan dan peningkatan kapasitas, meningkatkan daya saing, mendorong kemitraan, dan mendorong kontribusi untuk mengurangi kemiskinan (UNWTO, 2024). Oleh sebab itu, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah yang juga melalui proses perencanaan pembangunan (Saarinen, Rogerson, & Hall, 2017).

Proses pengembangan pariwisata yang masal sering menimbulkan kesenjangan sosial dan menimbulkan resiko baru terhadap keberlanjutan (Naranjo Llupart, 2022). Pengembangan daerah wisata mempunyai pengaruh yang besar terhadap beberapa isu yang terkait seperti isu lingkungan hidup, keberlanjutan, ekonomi masyarakat hingga isu terkait perlindungan serta pemberdayaan terhadap masyarakat adat yang berada di lokasi pariwisata (Guo, Jiang & Li, 2019; Khalid, et. al, 20219). Dalam studi yang dilakukan oleh Guo, Jiang dan Li (2019), program pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah sering mendapatkan kritik terutama kesenjangan ekonomi yang terjadi dan kurangnya rencana jangka panjang terhadap pengembangan daerah wisata. Beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasikan diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, dan promosi tempat wisata yang masif (Guo, Jiang & Li, 2019).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata ini menimbulkan isu dan permasalahan tersendiri, diantaranya adalah ketergantungan terhadap asing dan pemerintah pusat, pengrusakan lingkungan hidup, kehilangan pendapatan dan identitas lokal (Guo, Jiang & Li, 2019).

Untuk mengurangi dampak negatif dari pengembangan dan perencanaan sektor pariwisata, isu keberlanjutan (sustainability) menjadi salah satu faktor penting yang menjadi perhatian dan diadvokasi oleh berbagai institusi internasional seperti UWTO (Grillie et.al, 2021). Upaya untuk mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan dan secara ekonomi berkelanjutan serta peka terhadap kondisi lokal menjadi relevan dengan target SDG (Sustainable Development Goals) yang ingin dicapai termasuk SDG Target 8 (Penciptaan Lapangan Pekerjaan), Target 10 (mengurangi ketidakmerataan ekonomi), Target 11 (Perlindungan terhadap warisan budaya nasional), serta Target 14 dan Target 15 (biodiversitas laut dan alam) (Grillie et.al, 2021). Dalam mengintegrasikan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, dan pencapaian target SDG untuk mendorong sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan, diperlukan koordinasi di antara para aktor terlibat termasuk melibatkan masyarakat lokal.

Selain bentuk pariwisata yang berkelanjutan, aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan lokasi wisata terutama pengembangan desa wisata menjadi salah satu aspek penting yang dapat mendorong pariwisata berbasis masyarakat (Utami, Taufik, & Bhakti, 2019). Desa wisata yang dikembangkan pemerintah bertujuan untuk mengakselerasi aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup di daerah pedesaan yang mempunyai potensi wisata (Utami, Taufik, & Bhakti, 2019). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengkategorikan desa wisata kedalam 4 kelompok, yakni Rintisan (Desa wisata yang baru mulai beroperasi dan masih dalam lingkup terbatas); Berkembang (Desa wisata yang telah stabil dan memiliki kepengurusan yang jelas); Maju (Desa wisata yang memiliki peran aktif terhadap perkembangan ekonomi warga desa dan sekitarnya); dan Mandiri (Desa wisata yang sudah memiliki pengunjung dari lingkup yang lebih luas) (Kemenparekraf, 2024). Dari keempat kategori ini, dapat dilihat perbedaan cakupan dan kapasitas desa wisata, karena tingkat kebutuhan dan isu masing-masing berbeda.

Oleh sebab itu, proses pengembangannya pun berbeda, walaupun isu yang dihadapi mungkin memiliki kemiripan, walaupun kesiapan institusi dan aparat pendukung yang tersedia berbeda.

Berbagai aspek yang dihadapi ini menjadi salah satu indikasi pentingnya studi dan kajian lebih mendalam terkait pengembangan daerah wisata dilakukan. Oleh sebab itu, masukan bagi pengembangan kebijakan yang berbasis penelitian yang terintegrasi (policy based research) diperlukan untuk mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan identifikasi tantangan dan peluang diatas, dapat diindikasikan bahwa penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan kebijakan terkait pariwisata termasuk pengembangan komunitas yang terintegrasi perlu dilakukan, terutama dalam konteks daerah pariwisata di Indonesia. Dengan dua daerah desa wisata yang menjadi fokus proyek inisiatif ini, yakni Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan dan Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, maka diharapkan masukan bagi pengambil keputusan dapat diberikan berdasarkan kondisi lapangan.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana pengembangan desa wisata di Indonesia dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat? Dengan cakupan penelitian pada dua desa wisata tersebut, diharapkan cakupan rekomendasi kebijakan mencakup rekomendasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dua Kabupaten tersebut.

REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan program pariwisata nasional, dibawah ini adalah identifikasi peraturan pemerintah terkait, yakni:

- UU no. 10 / 2009 tentang Kepariwisataan Berkelanjutan;
- Permen Pariwisata 9/2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata;
- Permenpar / PermenPPA / Permendes No. 82/2024 - No. 008 / 2024 - No. 463 / 2024 tentang Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan;
- PP no. 24/2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan.

Selain itu, program pengembangan pariwisata juga dicantumkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

KONDISI KEKINIAN

Kondisi Pariwisata Nasional

Indonesia memiliki potensi strategis di sektor pariwisata dengan pemandangan alam baik darat dan laut serta kekayaan budaya yang sangat besar. Pariwisata mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian diantara sebagai salah satu pendapat negara dan penciptaan lapangan pekerjaan baru serta pengentasan kemiskinan. Devisa pariwisata Indonesia telah ditargetkan mencapai 100 Miliar USD hingga 2045. Sektor pariwisata juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya adalah terkait faktor pendanaan. Sektor pariwisata mempunyai kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 6 Triliun untuk pengembangan Major Project (MP) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) yakni Rupiah Murni (RM). Kebutuhan pendanaan lain yang diproyeksikan adalah dari DAK (Dana Alokasi Khusus), Pinjaman Hibah Luar Negeri, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan Swasta.

Pariwisata Daerah

Kasus 1: Desa Wonokitri - Pasuruan (Jawa Timur)

Desa Wonokitri Pasuruan, Jawa Timur, menjadi salah satu desa di bawah gunung Bromo yang menjadi salah satu tumpuan pemberangkatan menuju ke gunung Bromo Jawa timur yang terletak di kaki gunung di kabupaten Pasuruan. Namun Desa Wonokitri masih menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan, baik yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun kelompok komunitas masyarakat yang terlibat dengan wisata gunung Bromo khususnya pengusaha Jeep dan UMKM.

Desa Wonokitri memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama dalam hal wisata alam dan budaya. Keberadaan Taman Edelweiss, upacara adat, dan keindahan alam sekitar Gunung Bromo menjadi daya tarik utama. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya solidaritas, belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan kurangnya pengetahuan digitalisasi menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Kasus 2: Batu Cermin - Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur)

Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata utama yang diidentifikasikan sebagai 'New Bali'. Namun Labuan Bajo masih memiliki banyak keterbatasan dan tantangan, baik yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun yang dihadapi oleh kelompok komunitas. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah juga masih sangat rendah dibawah 1%. Desa Batu Cermin di Kota Labuan Bajo, Kepulauan Komodo, merupakan salah satu Desa wisata di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi salah satu desa binaan BINUS. Desa Batu Cermin masuk dalam kategori 'Berkembang' berdasarkan Kemenparekraf (2024). Desa Batu Cermin dikenal karena mempunyai keunikan budaya dan alam yang masih terjaga baik diantaranya Goa Batu Cermin, Panorama Alam dan Kearifan Lokal tradisional.

Beberapa potensi dari Desa Batu cermin diantaranya adalah ekowisata atau pengembangan paket wisata yang berfokus pada kelestarian lingkungan seperti tur edukasi mengenai Goa; pelestarian dan promosi budaya lokal seperti kerajinan dan pertunjukan seni tradisional; serta pengembangan agrowisata termasuk potensi pertanian lokal dan produk pertanian tradisional. Namun beberapa tantangan dapat diidentifikasikan diantaranya adalah terkait masalah infrastruktur dan aksesibilitas, pelestarian lingkungan dan budaya, pendanaan dan sumber daya, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat.

TEMUAN DARI OBSERVASI

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal Mei 13-16, 2024 di Desa Wonokitri Pasuruan, Jawa Timur, dan pada Juli 23-26, 2024 di Batu Cermin, Labuan Bajo, NTT, dapat diidentifikasikan beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat:

1. BUMDes kurang berperan dalam mengelola desa wisata:

   BUMDes di Indonesia seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangannya. Beberapa kelemahan umum yang sering ditemui antara lain

   - **Keterbatasan Sumber Daya**: BUMDes seringkali kekurangan modal, sumber daya manusia yang terampil, serta akses terhadap teknologi informasi yang memadai. Hal ini membuat BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
   - **Kurangnya Inovasi**: Banyak BUMDes yang masih menjalankan usaha dengan cara tradisional dan kurang inovatif. Padahal, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing.
   - **Kelemahan Manajemen**: Kelemahan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan produksi juga menjadi kendala bagi BUMDes. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang manajemen bisnis membuat BUMDes sulit untuk berkembang secara optimal.
   - **Koordinasi yang Lemah:** Koordinasi antara BUMDes dengan pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat seringkali kurang efektif. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi dalam pengembangan usaha.

Kelemahan BUMDes di Desa Wisata Wonokitri dan Batu Cermin

Selain kelemahan umum di atas, BUMDes di Desa Wisata Wonokitri Bromo dan Desa Batu Cermin juga memiliki tantangan spesifik. Salah satu tantangan utama adalah solidaritas masyarakat yang masih rendah. Hal ini menyebabkan sulitnya mengkoordinasikan kegiatan usaha dan mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, kurangnya pengetahuan digitalisasi juga menjadi hambatan dalam mengembangkan pemasaran dan promosi produk wisata

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- **Kurangnya Dukungan Pemerintah**: Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan fasilitasi masih belum optimal. Hal ini membuat BUMDes kesulitan untuk berkembang.
- **Kurangnya Partisipasi Masyarakat**: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih rendah. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja sendiri-sendiri daripada berkolaborasi dalam BUMDes.
- **Lingkungan Bisnis yang Tidak Kondusif**: Persaingan bisnis yang ketat, akses pasar yang terbatas, dan regulasi yang belum jelas juga menjadi tantangan bagi BUMDes.

2. Persaingan antara pemilik Jeep untuk membawa pegunjung ke Gunung Bromo dan Pemilik Homestay di Batu Cermin:

Persaingan antara pemilik Jeep di kawasan Gunung Bromo dan pemilik homestay di Batu Cermin merupakan salah satu tantangan serius yang menghambat partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Persaingan yang tidak sehat ini seringkali memicu konflik, mengurangi solidaritas, dan menghambat terbentuknya kohesi sosial yang kuat.

Faktor penyebab dari persaingan yang intensif ini antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya**: Jumlah wisatawan yang mengunjungi Gunung Bromo relatif stabil, sementara jumlah pemilik Jeep terus bertambah. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat dalam memperebutkan penumpang, sehingga setiap pemilik Jeep berusaha menarik sebanyak mungkin wisatawan dengan berbagai cara. Sehingga sebagian besar pengelola jeep adalah para pemodal yang beberapa berasal dari daerah luar desa Wonokitri. Dalam kasus yang berdeda di Batu Cermin, pemilik homestay di Desa Batu Cermin banyak yang memodifikasi homestay menjadi kontrakan bulanan dan tidak dijadikan homestay karena keterbatasan wisata yang menginap di daratan.

- **Kurangnya Regulasi**: Ketiadaan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan transportasi wisata di kawasan Gunung Bromo dan pengelolaan homestay di desa Batu Cermin membuat meningkatnya persaingan semakin meningkat. Padahal prinsip utama dari Desa Wisata adalah memperkuat basis komunitas desa bukan justru mempertajam persaingan seperti industri perkotaan yang dibuat berdasarkan kekuatan modal dan pasar.
- **Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Kerjasama**: Banyak pemilik Jeep dan pemilik homestay yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Mereka kurang menyadari bahwa kerjasama yang baik antar sesama pelaku usaha akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Alat transportasi Jeep dan juga homestay merupakan salah satu faktor penopang industri wisata desa yang penting. Sehingga memiliki potensi untuk mengintegrasikan dengan berbagai object wisata maupun seluruh pelaku desa wisata. Keberadaan institusi yang transparan dan jelas akan menjadi vital untuk meningkatkan kesadaran untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam sebuah sistem yang berbasis masyarakat.

Dampak Negatif dari persaingan yang tidak sehat ini terhadap kohesi sosial desa antara lain:

- **Terpecahnya Solidaritas**: Persaingan yang sengit dapat memicu perpecahan di antara masyarakat desa. Pemilik Jeep dan homestay yang merasa dirugikan oleh tindakan pesaingnya akan cenderung saling menyalahkan dan tidak mau bekerja sama.
- **Menurunnya Kualitas Pelayanan**: Dalam upaya untuk menarik wisatawan, beberapa pemilik Jeep atau homestay berpotensi untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis, seperti menawarkan harga yang terlalu murah atau memberikan pelayanan yang kurang memuaskan. Hal ini akan merusak citra desa wisata dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung kembali.

- **Hambatan dalam Pengembangan Desa Wisata:** Persaingan yang tidak sehat akan menghambat upaya pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Masyarakat akan sulit untuk bersatu padu dalam menyusun rencana pengembangan desa dan melaksanakan program-program yang telah disepakati.

3. Kurangnya Pengetahuan digitalisasi di Kalangan Masyarakat dan Khususnya UMKM:

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Desa Wisata Wonokitri dan begitu juga di Desa Batu Cermin adalah kurangnya pengetahuan digitalisasi di kalangan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Kemampuan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, internet, dan media sosial masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata desa.

Dampak Negatif terhadap Daya Saing Desa Wisata. Kurangnya pengetahuan digitalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing Desa Wisata. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:

- **Keterbatasan dalam Pemasaran**: Tanpa pengetahuan digitalisasi, UMKM di Wonokitri dan begitu juga di Desa Batu Cermin kesulitan untuk memasarkan produk dan jasanya secara efektif. Walaupun penggunaan internet dan sosmed sudah ada, tetapi belum dalam kerangka strategi yang menyeluruh, masih sebatas inisiatif individu. Padahal, di era digital saat ini, pemasaran online melalui media sosial, website, atau marketplace memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dan efektif. Sehingga perlunya sebuah metode yang berbasis digital untuk mengintegrasikan semua potensi dan pelaku dalam sebuah institusi yang berbasis masyarakat desa.
- **Kesulitan Mengakses Informasi**: Kurangnya pengetahuan digital juga membuat masyarakat sulit mengakses informasi tentang perkembangan pariwisata, tren pasar, dan teknologi terbaru. Hal ini menghambat mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas layanan. Bahkan akibat kurangnya memanfaatkan akses internet menjadikan kurang optimalnya promosi dan penguatan pelayanan wisata desa Wonokriti dan begitu juga produk wisata di Batu Cermin.

- **Ketergantungan pada Perantara:** Akibat terbatasnya pengetahuan digital, UMKM seringkali harus mengandalkan perantara, seperti agen perjalanan atau biro jasa, untuk memasarkan produknya.

Hal ini tentu saja akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku usaha. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan digitalisasi di Desa Wisata antara lain:

- **Pendidikan**: Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam mengadopsi teknologi baru.
- **Aksesibilitas Teknologi**: Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang lambat dan mahal membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses internet.
- **Kurangnya Pelatihan**: Kurangnya program pelatihan yang spesifik mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha juga menjadi faktor penghambat.

4. Menciptakan produk lokal untuk souvenir baik dari hasil pertanian khasnya dari Desa Wisata atau sekitarnya

Desa Wisata biasanya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk lokal menjadi souvenir yang unik dan menarik. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan berbagai produk kerajinan tangan, makanan olahan, dan minuman khas yang bernilai tinggi.

Beberapa contoh produk yang dapat dikembangkan antara lain:

- **Kerajinan tangan**: Masyarakat Deasa dapat memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan serat tanaman untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan, seperti ukiran, anyaman, dan aksesoris.
- **Makanan olahan**: Hasil pertanian khas Desa Wisata seperti kentang, wortel, dan buah-buahan dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan, seperti keripik, selai, atau manisan.
- **Minuman khas**: Tanaman herbal dan rempah-rempah yang tumbuh di sekitar desa dapat dijadikan bahan baku untuk membuat minuman tradisional yang menyegarkan.

Untuk memaksimalkan potensi pengembangan produk lokal sebagai souvenir, beberapa faktor penting perlu diperhatikan:

- **Pengembangan Kreativitas**: Masyarakat perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk-produk yang unik dan menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, pelatihan desain produk, dan kunjungan ke daerah lain yang sudah maju dalam pengembangan produk kreatif.
- **Peningkatan Kualitas Produk**: Produk-produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar keamanan pangan. Perlu dilakukan pelatihan mengenai teknik pengolahan yang benar dan penggunaan bahan-bahan yang aman.
- **Pemasaran**: Produk-produk lokal perlu dipasarkan secara efektif agar dikenal oleh wisatawan. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan antara lain melalui media sosial, website, dan pameran kerajinan.
- **Pengemasan yang Menarik**: Pengemasan yang menarik dan informatif akan meningkatkan nilai jual produk. Desain kemasan harus mencerminkan identitas lokal dan memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan serta cara pembuatan produk.
- **Kemitraan dengan UMKM**: Perlu dibangun kerjasama yang kuat antara UMKM dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, perajin, dan pelaku wisata. Kemitraan ini akan mempermudah dalam hal pemasaran, pengembangan produk, dan akses terhadap sumber daya.

Pengembangan produk lokal sebagai souvenir akan memberikan banyak manfaat bagi Desa Wisata, antara lain:

- **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**: Penjualan produk lokal akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, terutama bagi UMKM.
- **Melestarikan Budaya Lokal**: Proses pembuatan produk-produk lokal akan membantu melestarikan budaya dan kearifan lokal.
- **Meningkatkan Daya Tarik Wisata**: Produk-produk lokal yang unik dan menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

- **Memperkuat Identitas Desa**: Produk-produk lokal akan menjadi identitas khas Desa Wisata souvenir khas Desa Wonokitri atau Batu Cermin yang berbeda dari produk yang dibuat oleh desa wisata lainnya.

Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, pengembangan produk lokal di Desa Wisata dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing desa wisata di kancah pariwisata nasional.

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK DESA WISATA

Berdasarkan data dan analisis yang ada, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Desa Wisata:

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

   Pembentukan Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW): BPDW akan menjadi lembaga yang bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan pariwisata di desa, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemasaran.

   - Fungsi utama lembaga ini adalah untuk: Membangun sebuah iklim usaha yang saling komplementer dan menciptakan networking yang sinergis antara pelaku. Lembaga ini juga berfungsi sebagai pusat peningkatan
   - Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan dan workshop, tingkatkan kapasitas masyarakat, terutama pemuda, dalam bidang pengelolaan pariwisata, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan.
   - BPDW merupakan institusi yang berkoordinasi untuk penguatan Peran BUMDes: BUMDes harus didorong untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengembangan produk-produk UMKM, pengelolaan destinasi wisata, dan penyediaan layanan pendukung pariwisata.

2. Pengembangan Produk Wisata Unggulan

   - Pengembangan Paket Wisata Tematik: Buat paket wisata yang menggabungkan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Contohnya, paket wisata trekking ke Taman Edelweiss, diikuti dengan mengikuti upacara adat dan menikmati kuliner khas desa. Begitu juga Paket wisata di Goa Batu cermin di Labuan Bajo.

- Digitalisasi Produk Wisata: Manfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk wisata desa, baik melalui *website*, media sosial, maupun aplikasi *mobile*.
- Pemberdayaan Masyarakat sebagai Aktor Wisata: Libatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan produk wisata, seperti pembuatan kerajinan tangan, pertunjukan seni, dan penyediaan akomodasi *homestay*.

3. Pelestarian Alam dan Budaya
   - Pengelolaan Taman Edelweiss yang Berkelanjutan di Desa Wonokitri, dan Goa Batu Cermin di Desa Batu Cermin: Buat peraturan yang jelas mengenai pengelolaan produk wisata seperti Taman Edelweiss di Desa Wonokitri dan Goa di Batu Cermin Labuan bajo, termasuk pembatasan jumlah pengunjung, larangan mengambil bunga, dan pengelolaan sampah.
   - Pelestarian Upacara Adat: Dukung pelaksanaan upacara adat secara berkelanjutan dan libatkan masyarakat dalam pelestariannya.
   - Pendidikan Lingkungan: Tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui program pendidikan lingkungan.

4. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Wisata yang dikelola oleh BUMDes sebagai salah satu tambahan pendapatan institusi
   - Peningkatan Aksesibilitas: Perbaiki infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk memudahkan akses wisatawan ke desa.
   - Penyediaan Fasilitas Wisata: Bangun fasilitas wisata yang memadai, seperti tempat parkir, toilet, dan pusat informasi.
   - Pengembangan Homestay: Dorong masyarakat untuk mengembangkan homestay yang berkualitas dengan fasilitas yang memadai.

5. Pemasaran dan Promosi
   - Pemasaran Digital: Manfaatkan platform digital untuk mempromosikan Desa Wisata sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik.
   - Kerjasama dengan Agen Perjalanan: Jalin kerjasama dengan agen perjalanan untuk memasarkan paket wisata.
   - Partisipasi dalam Pameran Pariwisata: Ikuti pameran pariwisata untuk memperkenalkan Desa Wisata kepada khalayak yang lebih luas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, BPDW, BUMDes, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Indikator Keberhasilan: Keberhasilan pengembangan pariwisata di desa wisata dapat dilihat dari:

- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Pelestarian lingkungan dan budaya
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Terbentuknya masyarakat yang sadar akan pentingnya pariwisata

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan di atas, desa wisata seperti desa Wonokitri, Pasuruan, dan desa Batu Cermin, Labuan Bajo, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi desa wisata yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI UMUM DAN USULAN PENGEMBANGAN

Dalam pengembangan daerah pariwisata terutama daerah wisata, beberapa masukan utama dapat diidentifikasi. Rekomendasi dalam pengembangan daerah tujuan wisata, terutama dalam kerangka desa wisata dibagi kedalam 2 usulan, yakni untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah.

Usulan untuk pemerintah Pusat:

- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas seperti akses jalan dan transportasi.
- Pemberdayaan dan edukasi masyarakat terutama dalam sektor yang menjadi pendukung kegiatan desa wisata.
- Pengelolaan konservasi lingkungan hidup dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan dan LSM internasional dan lokal.
- Pemasaran pariwisata dengan skala yang lebih luas dan masih melalui promosi secara digital, kolaborasi/kemitraan, dan pengembangan event.

- Pengembangan pendanaan alternatif diluar APBN dan APBD seperti dengan lembaga private, lembaga internasional dan aktor pembangunan di daerah lainnya.
- Evaluasi kegiatan secara berkala untuk mengidentifikasikan isu dan permasalahan.

Usulan untuk Pemerintah daerah:

- Pengembangan diversifikasi kegiatan dan usaha ekonomi di daerah terutama daerah lokasi wisata secara integrasi dengan penduduk lokal terutama dalam desa wisata.
- Koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha wisata perlu diperkuat dan dikembangkan secara lebih sistematis dan terstruktur.
- Pengadaan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola tempat wisata termasuk UMKM, termasuk pelatihan terkait promosi paket wisata.
- Perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang
- Koordinasi dengan daerah wisata di sekitar untuk pengembangan paket wisata penunjang.

REFERENSI

Grilli, G., Tyllianakis, E., Luisetti, T., Ferrini, S., & Turner, R. K. (2021). Prospective tourist preferences for sustainable tourism development in Small Island Developing States. Tourism Management, 82, 104178.

Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A sustainable tourism policy research review. Sustainability, 11(11), 3187.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2024). Tentang Jejaring Desa Wisata. Anugerah Desa Wisata 2024 - Jadesta (kemenparekraf.go.id) (Diakses 17 September 2024)

Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. Sustainability, 11(22), 6248.

Naranjo Llupart, M. R. (2022). Theoretical model for the analysis of community-based tourism: Contribution to sustainable development. Sustainability, 14(17), 10635.

Saarinen, J., Rogerson, C. M., & Hall, C. M. (2017). Geographies of tourism development and planning. Tourism Geographies, 19 (3), 307-317.

Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable development, 29(1), 259-271.

UNWTO. (2024) About United Nations on World Tourism Organisations (UNWTO). About Us (unwto.org). (Diakses 13 September 2024)

Utami, M. M., Taufik, H. E. R., & Bhakti, W. N. (2019, October). Village Tourism: The Implementation of Community-Based Tourism. In 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019) (pp. 537-542). Atlantis Press.

DR. LILI YULYADI ARNAKIM

Dr. Lili Yulyadi Arnakim merupakan Associate Professor di jurusan Hubungan Internasional dan editor *Journal of ASEAN Studies* (JAS), BINUS University, Jakarta. Beliau pernah menjadi profesor tamu di Asia Europe Institute (AEI), Universitas Malaya, 2016-2019. Proyek penelitiannya saat ini adalah tentang Mengintegrasikan SDGs ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Negara-Negara Asia Tenggara (2024), Pembiayaan Pembangunan di Asia Tenggara (2023), Pengaruh BRI terhadap Pengusaha Tiongkok di Asia Tenggara (2022), Kapitalisme Negara Tiongkok dan Pembangunan Ekonomi di Asia Tenggara (2021), Representasi Gender dan Pembangunan di Asia Tenggara (2020), Pembangunan regional di Asia Tenggara (2019), didanai oleh BINUS University, dan anggota tim penelitian tata kelola Global H2020 yang didanai oleh Komisi Eropa. Karya terbarunya telah dimuat di Journal of ASEAN Studies (JAS), Intellectual Discourse, AEI Insights: An International Journal of Asia-Europe Relations, Transylvanian Review, Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, Sejarah, CCPS, dan Jati (Journal of Southeast Asian Studi). Lili Yulyadi Arnakim meraih gelar Ph.D dari Universitas Malaya. Dapat dihubungi di lili.yulyadi@binus.edu

DR. MIRANDA P. TAHALELE

Dr. Miranda P. Tahalele, S.IP., MA. adalah Koordinator Konten Mata Kuliah/Dosen pada Departemen Hubungan Internasional - Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara (BINUS). Topik penelitian utamanya adalah politik kerja sama pembangunan internasional, ekonomi politik pembangunan internasional, gender dan pembangunan, dan bantuan luar negeri yang mengglobal, dengan fokus pada Kerja Sama Selatan-Selatan dan Hubungan Utara-Selatan. Dia mendapat gelar PhD di bidang Antropologi (Studi Pembangunan) dari Australian National University (ANU), memiliki gelar Master of Arts in Peace Studies (Conflict Resolution) dari University of Bradford - Inggris, dan gelar Sarjana Ilmu Politik dalam Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan. Beliau juga mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai konsultan/praktisi pembangunan dalam berbagai institusi pemerintah dan Lembaga internasional, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk G20 dan ASEAN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), UNDP, KFW, dan UNESCAP.

DR. ROSENO AJI AFFANDI

Dr. Roseno Aji Affandi, SE., MM., merupakan akademisi di bidang Hubungan Internasional yang dikenal dengan perpaduan antara keahlian akademis dan pengalaman praktis. Saat ini, beliau menjabat sebagai Koordinator Konten Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional di Universitas Bina Nusantara (Binus). Selain mengajar, ia juga berperan sebagai konsultan dan trainer bagi sejumlah klien nasional dan internasional, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Bappenas, Kemenparekraf, ILO, serta berbagai perusahaan besar. Keahlian beliau mencakup bidang Ekonomi Politik Internasional, Diplomasi Bisnis, Diplomasi Budaya, Tata Kelola Multi-Level, Paradiplomasi, Analisis Rantai Nilai (SVCA), dan Teknik Balance Scorecard (BSC). Beliau juga dikenal dalam pengembangan strategi bisnis dan pemasaran internasional serta model bisnis yang berkelanjutan. Beliau juga aktif berkontribusi melalui publikasi ilmiah yang membahas isu-isu global, seperti pengembangan kota berkelanjutan dan strategi bisnis yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat. Beberapa penelitian terbarunya mencakup studi mengenai kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhoksumawe, perdagangan bebas Sabang, dan diplomasi budaya melalui gamelan.

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

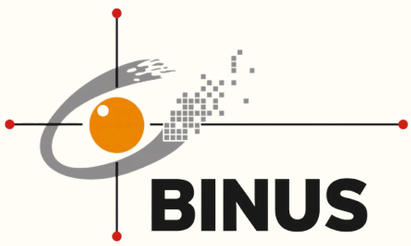

BINUS
UNIVERSITY

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL